



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II PAPUA BARAT

TAHUN ANGGARAN
2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang perhubungan darat.

Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan transportasi darat yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, serta disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga untuk periode perencanaan 2025–2029.

Muatan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025–2029, serta Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan tingkat keterhubungan transportasi darat yang beragam. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan strategis yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan aksesibilitas transportasi, peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi darat, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan transportasi darat di wilayah kerja.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, kebijakan reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik,

serta penguatan sumber daya manusia aparatur, sehingga Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis penyelenggaraan transportasi darat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan ditetapkannya Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025–2029 ini, maka seluruh dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat wajib disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra ini. Melalui keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur dan akuntabel, seluruh jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional Tahun 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan sistem transportasi darat yang andal, berkeselamatan, berdaya saing, dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Sorong, 30 Desember 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
DATAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	1
1.1.2 Capaian Rencana Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2020-2024	4
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	8
1.2.1 Potensi	8
1.2.2 Permasalahan	9
1.2.3 Isu Strategis	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	11
2.1 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	11
2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029	11
2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029	13
2.1.3 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029	13
2.2 Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 adalah	14
2.3 Tujuan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.....	15
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029	16
2.3.2 Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025- 2029.....	17
2.3.3 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	17
2.3.4 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	17

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	33
3.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	41
3.3 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	46
3.4 Arah kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	47
3.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran.....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
4.1 Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	57
4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan	57
4.1.2 Target Keluaran (<i>Output</i>) Pelaksanaan Kegiatan.....	60
4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029.....	63
4.2.1 Kebutuhan pendanaan	63
4.2.2 Skema Pendanaan	64
BAB V PENUTUP	65
5.1 KESIMPULAN	65
5.2 Arahan Pimpinan	66
5.3 Mekanisme Evaluasi.....	66
LAMPIRAN	67

DATAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan organisasi dan tata kerja	3
Gambar 2.1	VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029.....	11
Gambar 2.2	Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 Sumber: Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029	15
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Kelas II Papua Barat.....	1
Tabel 1.2	Pencapaian Sasaran Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024	6
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	18
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	34
Tabel 3.2	Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	38
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2025-2029.....	48
Tabel 3.4	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	51
Tabel 4.1	Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	58
Tabel 4.2	Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	61
Tabel 4.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat menggambarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebagai batasan ruang lingkup, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**

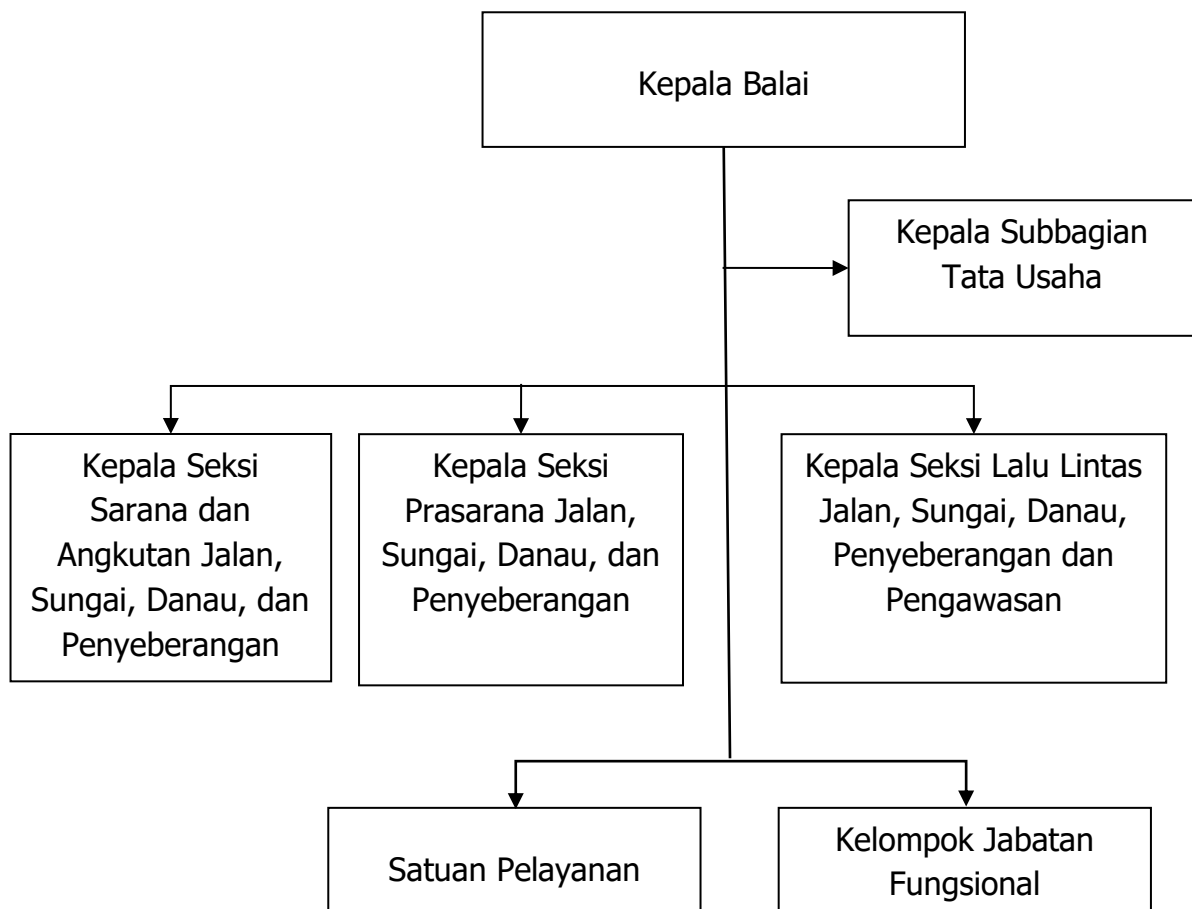
Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Kelas II Papua Barat

No	ASPEK	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
1.	Kedudukan BPTD	Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala.
2.	Tugas BPTD	Balai Pengelola Transportasi Darat, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

3.	Fungsi BPTD	1. penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan; 3. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan; 4. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan; 5. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; 6. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
----	-------------	---

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat disajikan pada gambar berikut



Gambar 1.1 Susunan organisasi dan tata kerja

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat di atas, maka cakupan bidang pembangunan dan pengelolaannya terdiri dari konektivitas transportasi darat, pelayanan transportasi darat, keselamatan transportasi darat, dan penunjang teknis transportasi darat. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang sarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 - . Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2025-2029;
 - . Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2025-2029;
 - . Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.

1.1.2 Capaian Rencana Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2020-2024

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 harus memperhatikan capaian dan permasalahan pada Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024 memiliki 5 (Lima) Sasaran Kegiatan, sebagaimana berikut ini:

- SK 1** Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK 2** Meningkatkan Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
- SK 3** Meningkatkan Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
- SK 4** Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat
- SK 5** Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2020-2024 disampaikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi																
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100%	100	98	98%	100	100	100%	100	98	98%	100	99,5	99,5%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	-	-	-	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	-	-	-
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	10	10	100%	11	11	100%	3	3	100%	4	4	100%	8	8	100%
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat																
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan standard pelayanan minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	-	-	-
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat																
IKP 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat	orang	0	0	0	100	100	100%	0	0	0	250	250	100%	500	500	100%
IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%
SK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat																
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					100%			99,8 %			100%			99,81%			99,96%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					8			9			9			10			8
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					0			1			0			1			1

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan pada Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2025-2029 menggunakan pendekatan identifikasi isu strategis dan analisis situasional pada sektor perhubungan darat. Identifikasi isu strategis dilakukan untuk menemukan permasalahan yang perlu dijawab dalam jangka menengah. Sementara itu, analisis situasional dilakukan untuk menemukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sektor perhubungan darat.

1.2.1 Potensi

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Terkait prasarana jalan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009.

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3. PM No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
- f. Pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian perhubungan.

1.2.2 Permasalahan

- 1. Aspek Teknis
 - a. Perubahan standar, kebijakan, dan arahan pimpinan yang mempengaruhi konsistensi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kesiapan dokumen perencanaan dan data dukung yang belum optimal.
 - c. Kesiapan dokumen lingkungan yang memerlukan proses dan waktu yang panjang.
 - d. Keterbatasan kondisi dan kesiapan sarana prasarana pendukung.
- 2. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Batal atau gagalnya proses lelang kegiatan.
 - b. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - c. Status lahan yang belum jelas serta hambatan dalam pembebasan lahan.
 - d. Perlunya penyesuaian kegiatan akibat kondisi lapangan.
- 3. Aspek Sosial
 - a. Konflik kepentingan dengan masyarakat setempat.
 - b. Vandalisme atau perusakan sarana prasarana oleh pihak tertentu.
 - c. Dampak sosial dan gangguan keamanan terhadap operasional kegiatan.
- 4. Aspek Hukum
 - a. Terdapat kegiatan yang belum memiliki dasar hukum yang memadai.
 - b. Proses penetapan regulasi yang belum terselesaikan di tingkat Setneg/Biro Hukum.
- 5. Aspek Pendanaan
 - a. Kekurangan atau tidak tersedianya alokasi anggaran.
 - b. Pengalihan atau relokasi jenis kegiatan (P3D).
 - c. Kebijakan penghematan anggaran (*self blocking*).
 - d. Permasalahan pencatatan dan penetapan status aset hasil kegiatan.
- 6. Aspek SDM dan Kelembagaan
 - a. Penerapan SAKIP yang belum optimal.

- b. Hambatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
 - c. Kekurangan SDM teknis operasional di lapangan.
 - d. Dampak reorganisasi kelembagaan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.
7. Aspek Koordinasi
- a. Proses perizinan dan rekomendasi dari K/L terkait yang memerlukan waktu.
 - b. Duplikasi kegiatan dengan kementerian/lembaga lain.
 - c. Belum optimalnya kesepakatan dan sinergi lintas sektor.
 - d. Dukungan stakeholder yang belum maksimal.
8. Aspek Data dan Informasi
- a. Belum tersedianya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi.
 - b. Kegiatan survei kinerja yang belum berjalan optimal.
 - c. Tidak tersedianya formulasi baku dalam perhitungan kinerja.

1.2.3 Isu Strategis

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

2.1.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 **“Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**



Gambar 2.1 VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

1. *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
2. *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang konektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

3. *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
4. *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dengan didasarkan pada Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029 dan penjabaran visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang telah disampaikan guna menjalankan dan mendukung hal tersebut, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

**VISI Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029
“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka
Mewujudkan Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas
2045”**

Selanjutnya dengan didasarkan pada Visi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029 dan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029 yang telah disampaikan guna menjalankan dan mendukung hal tersebut, maka Visi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan darat di tanah Papua
yang selamat, efektif dan efisien serta menjangkau seluruh Wilayah
Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Menuju Indonesia
Emas 2045”**

2.1.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029

diturunkan dari Misi Asta Cita Presiden 2025-2029 dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat;
8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.1.3 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025 – 2029

1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pengendalian kinerja yang terintegrasi dan berbasis hasil (result-based management).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, hukum, dan kehumasan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara optimal dan berkelanjutan.
3. Memperkuat manajemen sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan kompetensi, penataan organisasi dan tata kerja, serta

penerapan sistem merit untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan fungsi kesekretariatan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, keterpaduan data, serta kualitas pengambilan keputusan manajerial.
5. Mendorong penguatan koordinasi internal dan sinergi lintas unit kerja serta pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kebijakan dan program transportasi darat yang maju, berkeselamatan, dan berkelanjutan.
6. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip pengawasan internal yang efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2.2 Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 adalah

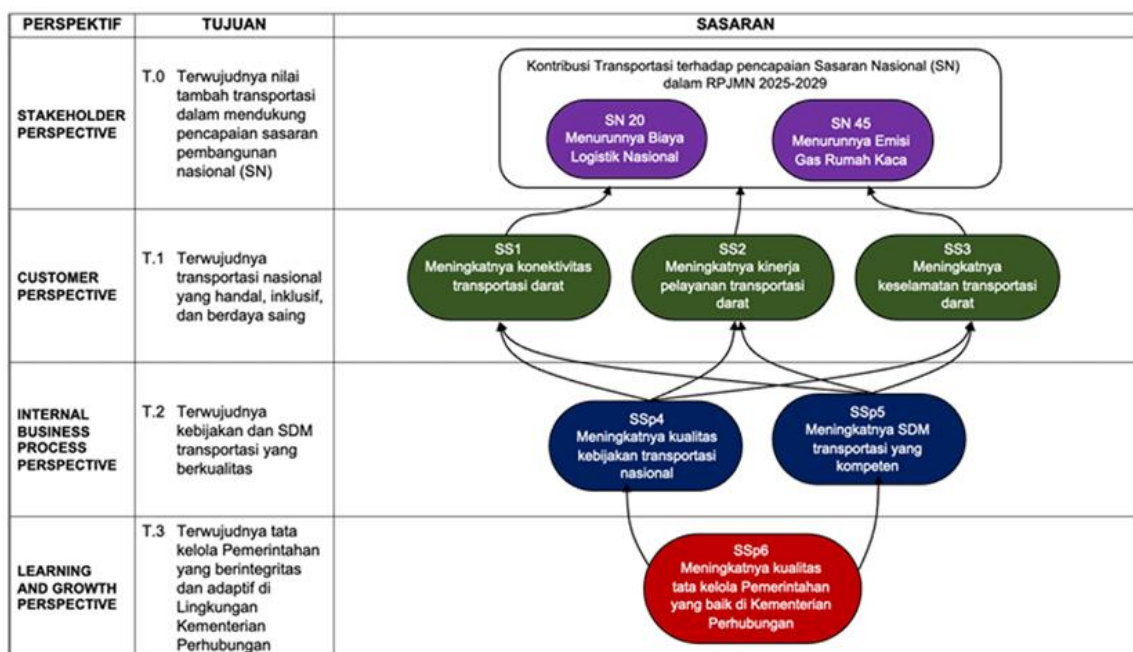
- a. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- f. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;

- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- h. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

2.3 Tujuan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut, maka struktur peta strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disampaikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 Sumber: Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029

- a. *Stakeholders Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pemangku kepentingan pada bidang perhubungan darat berupa manfaat atau dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan mendukung Visi Indonesia 2045;

- b. *Customer Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pengguna layanan transportasi darat berupa hasil atau outcome dari penyelenggaraan transportasi darat sesuai lingkup tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, yaitu: konektivitas dan layanan transportasi darat yang berkualitas dan berkeselamatan;
- c. *Internal Business Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan darat yang diwujudkan melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur transportasi (sarana, dan prasarana) maupun pengembangan SDM sektor transportasi darat yang berkualitas; dan
- d. *Learning and Growth Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Perhubungan Darat dalam penyediaan input/masukan bagi jalannya organisasi berupa penyediaan SDM internal, pendanaan, pengelolaan data dan informasi, perlengkapan kerja, regulasi, organisasi dan tata kerja yang dikelola sesuai prinsip good governance.

2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi darat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029
2. Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2.3.2 Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diturunkan dari tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu:

1. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas
2. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2.3.3 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi darat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
2. Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

2.3.4 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2025-2029). Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Sasaran Program (SP) yang ditetapkan pada level kementerian, yaitu Program Dukungan Manajemen. Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat selama periode 2025-2029 adalah:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan

KOD E SP	SASARAN PROGRAM	KODE IKP	INDIKATO R KINERJA PROGRAM	KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN	RUMUS
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	IKP1.1	Ratio Konektivitas transportasi Jalan	SK.1.1.1	Meningkatnya Konektivitas layanan angkutan umum massal perkotaan di Propinsi	IKK1.1.1	Jumlah layanan angkutan umum massal perkotaan	Jumlah Kota atau Kawasanyang dilayani oleh BTS yang dilaksanakan oleh BPTD/UPT	Dihitung jumlah kota / kawasan yang dilayani oleh BTS dengan DIPA BPTD/UPT
				SK.1.1.2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang adalah Jumlah layanan angkutan jalan penumpang yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang adalah Jumlah layanan angkutan jalan penumpang yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT

				SK.1.1.3	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi wilayah KSN/KI	IKK1.1.3 A	Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi	Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang pada wilayah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis lainnya yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang pada wilayah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis lainnya yang anggaran berada pada BPTD/UPT
						IKK1.1.3 B	Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan	Jumlah layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek Layanan Subsidi angkutan Barang pada Pusat Kegiatan Startegis, Kawasan Industri dan Kawasan Lumbung Pangan yang anggaran berada pada BPTD/UPT
				SK.1.1.4	Meningkatnya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas AKAP	IKK1.1.4	Jumlah Pembangunan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Jumlah terminal tipe A yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri	Jumlah terminal yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT. a. Nilai 1: selesai dibangun dan beroperasi (100%) b. Nilai 0,5: belum beroperasi dan mengikuti nilai realisasi fisik (Cth: 50%) c. Nilai lainnya mengikuti fisik pekerjaan

				SK.1.1.5	Meningkatnya layanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	IKK1.1.5	Jumlah Pembangunan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Jumlah terminal barang yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri	Jumlah terminal yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT. a. Nilai 1: selesai dibangun dan eroperasi (100%) b. Nilai 0,5: belum beroperasi dan mengikuti nilai realisasi fisik (Cth: 50%) c. Nilai lainnya mengikuti fisik pekerjaan
		IKP1.2	Ratio Konektivitas transportasi ASDP	SK.1.2	Meningkatnya Konektivitas transportasi angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	IKK1.2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP adalah Jumlah layanan angkutan ASDP yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT	Jumlah trayek layanan subsidi transportasi ASDP dalam satu tahun anggaran
						IKK1.2.2	Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri	Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT. a. Nilai 1: selesai dibangun dan beroperasi (100%) b. Nilai 0,5: belum beroperasi dan mengikuti nilai realisasi fisik (Cth: 50%) c. Nilai lainnya mengikuti fisik pekerjaan

SP2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Darat	IKP 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Jalan	SK2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah terminal tipe A yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan.	Jumlah terminal tipe A yang rehab/ ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.2	Jumlah terminal Barang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah terminal Barang yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan.	Jumlah terminal Barang yang rehab/ ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.3	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.4	Jumlah Operasional Layanan Terminal Barang sesuai SPM	Jumlah Operasional Layanan Terminal Barang sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan	Jumlah Operasional Layanan Terminal Barang sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.5	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang pada Jalan Nasional yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan.	Jumlah Fasilitas Perpindahan Penumpang pada Jalan Nasional yang rehab/ ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan. yang anggarannya berada pada BPTD/UPT

						IKK2.1.6	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan.	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang rehab/ ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan. yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.7	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.8	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan MRLL pada Jalan Nasional dan Event Khusus	Jumlah kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lalu lintas, ATCS/ITS, ATMS diwilayah kerja sesuai dengan ketentuan	Jumlah kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lalu lintas, ATCS/ITS, ATMS diwilayah kerja sesuai dengan ketentuan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluat kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LLAJ, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT

						IKK2.1.1 0	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi dokumen perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLAJ.	Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.1.1 1	Kegiatan Lainnya..		
		IKP 2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi ASDP	SK2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK2.2.1	Jumlah Pelabuhan ASDP yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Jumlah Pelabuhan ASDP yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan.	Jumlah Pelabuhan ASD yang rehab/ditingkatkan sampai memenuhi SPM sesuai Ketentuan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT

						IKK2.2.3	Jumlah Operasional Layanan Kapal Negara sesuai SPM	Jumlah Operasional Layanan Kapal Negara sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan	Jumlah Operasional Layanan Kapal Negara sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.2.4	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASDP, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT
						IKK2.2.5	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI ASDP	Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi LLASDP meliputi dokumen perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLASDP.	Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi LLASDP, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT

SP3	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKP 3	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	SK3.1	Meningkatkan keselamatan angkutan Penumpang dan Barang	IKK3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang	Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan	Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
						IKK3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang	Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan	Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
				SK3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT

						IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
						IKK 3.2.3	Jumlah pengadaan Alat Uji pada UPUBKB (Bantuan Teknis)	Jumlah pengadaan Alat Uji yang diberikan pada UPUBKB sebagai bantuan teknis	Jumlah pengadaan Alat Uji yang diberikan pada UPUBKB sebagai bantuan teknis yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
						IKK 3.2.4	Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi adalah Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan oleh BPTD guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kalibrasi alat uji UPUPKB Pemda diwilayah kerja	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan oleh BPTD guna mendukung pelaksanaan kegiatan Kalibrasi alat uji UPUPKB Pemda diwilayah kerja yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
				SK3.3	Menurunkan Jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda	Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda pada ruas Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis) yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT

						IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah diintervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll.	Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah diintervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll. yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
						IKK 3.3.3	Jumlah Pengadaan RAS yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)		
						IKK 3.3.4	Jumlah Pengadaan ZOSS yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)		
				SK3.4	Meningkatnya Kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 3.4.1	Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Serangkaian upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan menggunakan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkeselamatan.	Kampanye keselamatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dari pengguna jalan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan target peserta kampanye yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT

						IKK 3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Program edukasi keselamatan yang bertujuan menanamkan kesadaran dan perilaku tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak .	SALUD merupakan upaya pembentukan safety culture sejak dini dengan sasaran anak usia PAUD–SD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT
SP.4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKP.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Propinsi	kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Propinsi	Kegiatan terkait perencanaan jangka pendek , menengah dan panjang transportasi darat di Propinsi ...
						IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).	Kegiatan terkait PK, SAKIP, LAKIP, MR, SPIP dan LMCK pada BPTD yang dibiayain dengan Anggaran BPTD/UPT
						IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan	Kegiatan terkait Daya serap dan realisasi keuangan

						IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN	Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN yang dibiayain dengan Anggaran BPTD/UPT
						IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK karena menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.	Prosentase dihitung dari jumlah Rekomendasi BPK yang telah di tindaklanjuti (Status Proses) dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima.
						IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Semakin tinggi tingkat digitalisasi arsip di suatu instansi, maka tantangan pengawasan kearsipan juga semakin kompleks, Capaian kegiatan tingkat digitalisasi arsip dihitung dengan Pengawasan Kearsipan Internal, Sosialisasi Kearsipan

						IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional.	Jumlah Kegiatan untuk menindak lanjuti jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun
						IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah Kegiatan untuk menindak lanjuti jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun

						IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan	Jumlah Kegiatan terkait ZI, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam 1 tahun
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	---

						IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.	Jumlah Kegiatan terkait Survey Kepuasan pengguna jasa
--	--	--	--	--	--	----------	---	---	---

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Arah kebijakan untuk menjawab isu strategis bidang perhubungan darat dan arahan Prioritas Nasional dan indikasi kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Astacita pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

- a. Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik
- b. Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan;
- c. Konektivitas wilayah daratan;
- d. Afiriasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK;
- e. Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan;
- f. Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil;
- h. Penanganan kendaraan barang ODOL; dan
- i. Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.

Arah kebijakan untuk menjawab isu strategis bidang perhubungan darat dan arahan Prioritas Nasional dan indikasi kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Astacita pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Penguatan Infrastruktur Konektivitas & Sarana Penunjang Logistik b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita: - Pendukung Asta Cita 3: Pembangunan Terminal Barang Moda Jalan; - Pendukung Asta Cita 5: Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional dan Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang
Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 6: Buy The Service (BTS) BRT Perkotaan	Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
Konektivitas wilayah daratan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) - Pendukung Asta Cita 3: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan	Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan Terminal Barang Internasional di wilayah perbatasan	Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
	- Pendukung Asta Cita 6: Penyelenggaraan angkutan keperintisan moda jalan dan PSO angkutan barang.	
Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Pembangunan/rehab/pengembangan pelabuhan TSDP (termasuk pelabuhan Ro-Ro), Pembangunan Halte Sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan; dan Pengembangan dan penetapan lintas komersil maupun perintis penyeberangan di kawasan timur - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan/revitalisasi/peningkatan pelabuhan SDP pada kawasan prioritas	Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau
Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan nasional dan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil	a. Kegiatan prioritas pada Asta Cita/Prioritas Nasional 2: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 2: Insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, Pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan, Pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, Implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, dan Pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Penanganan kendaraan barang ODOL	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang)	Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
		Fokus pada Angkutan Barang Khusus
Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan	Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang;
- AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
- AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
- AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
- AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau
- AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
- AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus
- AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja
- AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi
- AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul
- AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
- AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

Penyelarasan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 untuk menjawab Sasaran Program yang diturunkan dari balanced scorecard disajikan pada Tabel 3.2. Dengan memperhatikan kesamaan lokus, Sasaran program meningkatnya konektivitas transportasi darat (SP.1) dan kinerja pelayanan transportasi darat (SP.2) digabungkan untuk dijawab oleh satu arah kebijakan pada masing-masing lokus bidang perhubungan darat. Masing-masing arah kebijakan di atas diuraikan menjadi Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.2 Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang	Meningkatkan konektivitas antara gateway (pelabuhan & bandar udara), kawasan industri, dan pusat logistik/terminal barang sebagai pusat konsolidasi/ distribusi
		Meningkatkan kelancaraan arus barang untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama pulau
	AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan	Meningkatkan coverage area angkutan perkotaan dengan integrasi jaringan angkutan umum massal perkotaan yang door-to-door dan seamless
		Meningkatkan panjang perjalanan angkutan umum perkotaan sebagai moda prioritas
		Menurunkan panjang perjalanan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan
	AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan	Meningkatkan konektivitas antar terminal penumpang Tipe A pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan pada KEK, KSN, dan KI
		Meningkatkan jumlah penumpang angkutan antar kota dan antar moda
		Meningkatkan kelancaraan lalu lintas pada koridor utama pulau
	AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di	Meningkatkan aksesibilitas Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	Menurunkan biaya angkutan barang berbasis jalan dari/ke pelabuhan menuju hinterland di wilayah DTPK
	AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau	Meningkatkan kapasitas lintas angkutan penyeberangan komersial dan perintis
		Meningkatkan jumlah kendaraan yang diangkut dengan angkutan penyeberangan komersial
SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Menurunkan paparan risiko perjalanan lalu lintas jalan
		Menurunkan jumlah konflik lalu lintas jalan
		Meningkatkan kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan
		Meningkatkan pemenuhan active & passive safety pada kendaraan yang turun ke jalan
		Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan
		Meningkatkan tata kelola pelaksanaan rencana aksi keselamatandan kemitraan keselamatan lalu lintas jalan
	AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar	Menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan	Menurunkan emisi gas rumah kaca LLAJ
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus	Meningkatkan kepatuhan dimensi dan muatan pada angkutan barang khusus (tidak berbahaya dan berbahaya) dengan didukung pengawasan operasional secara digital
SPp4Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi darat	AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan kehandalan sistem informasi LLAJ untuk menyediakan Actual Data bagi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja
	AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi	Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi
SPp5Meningkatnya SDM transportasi darat yang kompeten	AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul
SPp6Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
	AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat	Meningkatkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

3.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Secara umum, kerangka regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu terhadap Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat serta fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berikut dengan Unit Organisasi dibawahnya merupakan bagian dari instansi pemerintah yang harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.

Regulasi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara spesifik juga mengacu kepada:

- a. Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat mandatory, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat complementary, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh. Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/ administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran stakeholders dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang perhubungan.

Analisis kebutuhan regulasi untuk mendukung implementasi program dan kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029:

- a. Pengaturan terkait regulasi pendukung transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan dasar. Undang-undang sektor transportasi yang ditetapkan pada periode Tahun 2004-2010 sebagai hasil reformasi, mendorong pelibatan swasta dan pemda dalam penyelenggaraan sektor transportasi.

Undang-undang tersebut telah memberikan kemajuan dalam pola kelembagaan dan pendanaan transportasi yang lebih terbuka.

Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi defisit penyediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi di kawasan perkotaan maupun antarwilayah, merupakan dampak terbatasnya dukungan pendanaan bagi pembangunan sektor transportasi. Hal ini dikarenakan belum adanya konsentrasi pendanaan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan pelayanan transportasi, karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menempatkan transportasi sebagai bagian dari urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Pendefinisian transportasi sebagai urusan wajib yang menjadi bagian dari pelayanan dasar dalam Undang-Undang Pemerintahan maupun Undang-Undang setiap moda transportasi diharapkan akan mendukung komitmen pendanaan bagi sektor transportasi yang akan menjamin kehadiran negara dalam memfasilitasi transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan dan warga DTPK.

- b. Pengaturan terkait regulasi pembagian wewenang dalam penanganan permasalahan di sub sektor perhubungan darat. Hal ini dikarenakan belum adanya penentuan wewenang penyelenggaraan yang lebih spesifik antara pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan pelayanan transportasi.

Pembagian dan pendefinisian lebih lanjut terkait wewenang ini dibutuhkan agar seluruh stakeholder pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menjalankan peran secara maksimal dalam menyelenggarakan layanan transportasi darat. Pembagian dan pendefinisian lebih lanjut terkait wewenang ini juga dilakukan untuk mendukung semangat pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara konkuren, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

- c. Pengaturan regulasi pendukung transformasi penerapan teknologi di sektor transportasi. Penyelenggaraan transportasi global akan dihadapkan kepada penetrasi teknologi pada Industry 4.0 yang semakin mendalam sehingga mewujudkan sistem ekonomi dan sosial pada tahap Society 5.0. Penerapan teknologi Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things akan merubah secara dramatis wajah sistem transportasi ke depan.

Kemampuan suatu sektor/negara dalam mendorong transformasi teknologi untuk efisiensi pelayanan merupakan kunci daya saing di persaingan global ke depan. Hal ini juga berlaku untuk sektor transportasi nasional yang diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur teknologi maju yang tepat guna dalam ekosistem baru yang juga kondusif. Diperlukan regulasi yang mampu mendorong pembaruan penerapan teknologi transportasi yang tepat guna dengan tetap memperhatikan kelayakan investasi, persaingan yang sehat, serta kedaulatan dan kemandirian nasional.

Penerapan regulasi pendukung percepatan penerapan transportasi ramah lingkungan. Komitmen Indonesia (NDC) untuk mencapai Net Zero Emission di Tahun 2060 harus didukung oleh strategi migrasi penerapan transportasi yang ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi yang signifikan dan pengonsumsi energi fosil yang terbesar.

Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang sifatnya insentif/disiinsentif untuk mempercepat migrasi penggunaan energi yang ramah lingkungan serta mendorong penggunaan angkutan umum dan non-motorized. Selain itu, penerapan skema investasi berbasis nilai ekonomi karbon dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan sektor transportasi nasional yang ramah lingkungan. Hal ini akan memberikan dukungan maksimal terhadap komitmen nasional untuk mewujudkan Net Zero Emission di tahun 2060.

- d. Regulasi Pendukung Ekosistem Transportasi Perkotaan di Masa Depan. Integrasi angkutan jalan dalam sistem transportasi perkotaan masa depan yang berbasis Mobility as a Service (MaaS) memerlukan pengaturan yang jelas. Kebijakan ini akan memperkuat koordinasi antara angkutan jalan dengan moda transportasi lainnya, sehingga memungkinkan terciptanya sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan mudah diakses. Pengembangan sistem pembayaran dan layanan on-demand juga akan menjadi bagian penting dari kebijakan ini.
- e. Pemenuhan (Compliance) Standar dan Regulasi Internasional di Sektor Transportasi. Dengan semakin terhubungnya pasar global, sektor angkutan jalan di Indonesia perlu menyesuaikan standar dan regulasi dengan ketentuan internasional. Regulasi ini akan memastikan bahwa angkutan jalan dapat bersaing secara efektif di pasar internasional, serta mematuhi aturan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian perdagangan dan lingkungan global. Pemenuhan standar internasional di sektor

angkutan jalan juga akan meningkatkan daya saing dan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan global.

- f. Penguatan regulasi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penyusunan Perpres mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, terdapat beberapa kebutuhan penguatan regulasi pada unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu:

- 1. Angkutan Jalan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diperlukan guna menyesuaikan pelaksanaan perizinan angkutan tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan juga perlu direvisi, khususnya terkait klasifikasi dan jenis angkutan barang serta sistem perizinan yang ada. Demikian dengan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek harus dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan perizinan. Semua revisi ini sangat penting agar regulasi yang ada dapat diterapkan dengan lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini. Direktorat Angkutan Jalan ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam proses revisi ini, dengan target penyelesaian pada tahun 2025-2026. Beberapa instansi terkait yang akan dilibatkan dalam proses ini meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi/BKPM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Organisasi Angkutan Darat (Organda).

- 2. Lalu Lintas Jalan

Penguatan regulasi bidang Lalu Lintas Jalan terkait manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, penyelenggaraan perlengkapan jalan, dan pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan. Penguatan regulasi ini diperlukan agar pelaksanaan kinerja dari Direktorat Lalu Lintas Jalan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, penguatan regulasi ini juga akan membantu Direktorat Lalu Lintas Jalan maupun 4 (empat) Subdirektorat yang ada dibawahnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi dalam periode-periode sebelumnya.

3. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Revisi peraturan ini dibutuhkan untuk menyesuaikan pelaksanaan Uji Tipe dan Uji Berkala kendaraan bermotor. Selain itu, dibutuhkan pengaturan terkait kendaraan bermotor listrik khususnya di aspek perizinan dan keselamatan serta pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, Pengaturan Standar Keselamatan untuk jalur sepeda, trotoar dan halte, dan Pengaturan terkait dengan sosialisasi, promosi, dan kemitraan bidang sarana dan keselamatan.

4. Prasarana Transportasi Jalan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait Penyelenggaraan Terminal Penumpang dan barang Angkutan Jalan serta fasilitas pendukung dan integrasi moda khususnya terkait pembentukan SPM penyelenggaraannya. Selain itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut terkait pembagian peran pelaksanaan UPPKB dan pengaturan lebih spesifik terkait kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

5. Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, Revisi peraturan ini dibutuhkan untuk penyesuaian lebih lanjut terkait alur pelayaran angkutan sungai dan danau. Selain itu, dibutuhkan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengerukan dan Reklamasi Sungai dan Danau serta Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanggulangan Pencemaran Alur Sungai dan Danau serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan pembentukan blueprint transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

3.3 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 6 (enam) unit kerja Eselon II yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana

dan Keselamatan Transportasi Jalan; dan Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat pada gambar berikut.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

3.4 Arah kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat di wilayah Papua Barat untuk periode 2025–2029, yang ditujukan guna menjawab isu-isu strategis perhubungan darat, mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Astacita, serta memastikan keterpaduan dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan, daerah tertinggal, perbatasan, dan kebutuhan peningkatan konektivitas, keselamatan, aksesibilitas, serta tata kelola transportasi darat di Papua Barat.

Berikut arah kebijakan yang disajikan dalam Tabel 3.2 Arah Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2025-2029

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Konektivitas	Penguatan konektivitas nasional	– Penguatan layanan angkutan perintis jalan dan penyeberangan (orang dan barang) untuk membuka akses wilayah DTPK; – Optimalisasi konektivitas jaringan transportasi darat antara pelabuhan, bandar udara, terminal, dan pusat distribusi logistik; – Pengendalian sistem angkutan barang untuk mendukung penurunan biaya logistik wilayah.
Integrasi moda	Peningkatan integrasi transportasi antarmoda	– Peningkatan penyediaan fasilitas keterpaduan antarmoda pada simpul utama; – Pengembangan jaringan pelayanan pemadu moda berbasis kebutuhan wilayah kepulauan dan hinterland; – Pengembangan transportasi multimoda angkutan barang.
Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi	– Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat; – Peningkatan kinerja SDM transportasi darat.
Transportasi Perkotaan	Peningkatan mobilitas transportasi perkotaan	– Peningkatan penyediaan kinerja pelayanan, dan peran moda angkutan umum massal perkotaan; – Peningkatan efektivitas penerapan skema manajemen lalu lintas pada jalan perkotaan; – Peningkatan integrasi transportasi dan tata ruang; – Peningkatan penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> di perkotaan.
Keselamatan Transportasi	Peningkatan keselamatan transportasi darat	– Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, serta fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; – Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana; – Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Lingkungan dan Keberlanjutan	Dukungan transisi transportasi darat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	– Dukungan pengendalian emisi kendaraan bermotor dan peningkatan kualitas lingkungan transportasi; – Penerapan prinsip transportasi berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah; – Sinergi lintas sektor dalam mendukung pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil.
Tata Kelola dan Data	Penguatan tata kelola penyelenggaraan transportasi darat berbasis data aktual	– Penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program transportasi darat berbasis actual data LLAJ dan kebutuhan riil wilayah Papua Barat; – Peningkatan kapasitas kelembagaan BPTD Kelas II Papua Barat dalam pelaksanaan fungsi teknis, pengawasan, dan pelayanan transportasi darat; – Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perhubungan darat yang adaptif terhadap tantangan wilayah kepulauan dan daerah tertinggal; – Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi darat dan penyeberangan; – Peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja melalui percepatan Reformasi Birokrasi.

Sumber: Hasil Analisis (2025)

3.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 secara umum terdiri dari:

- AK.1** Penguatan Konektivitas Transportasi Darat
- AK.2** Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- AK.3** Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat
- AK.4** Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional
- AK.5** Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan
- AK.6** Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ
- AK.7** Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP
- AK.8** Dukungan transisi transportasi darat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- AK.9** Penguatan tata kelola penyelenggaraan transportasi darat berbasis data aktual

Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan penyelenggaraan transportasi darat di wilayah Papua Barat, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Prioritas Nasional (Astacita), serta memastikan keterpaduan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, kebutuhan peningkatan konektivitas dan keterpaduan antarmoda, peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi darat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/*project* seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	SRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI PRIORITAS/PROJECT	KEGIATAN
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan dan penguatan jaringan transportasi darat dan penyeberangan pendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Prioritas Nasional, serta wilayah DTPK secara terpadu dan berkelanjutan Peningkatan kualitas layanan transportasi darat melalui penguatan sarana, prasarana, SDM, dan pengawasan operasional	– Revitalisasi dan optimalisasi terminal penumpang dan barang serta fasilitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) eksisting pada jalur utama nasional (PKN, PKW, PKSN) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI); – Pembangunan dan rehabilitasi simpul transportasi darat dan penyeberangan (terminal penumpang/barang dan TSDP) untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan konektivitas antar moda; – Penguatan jaringan angkutan AKAP, AKDP, angkutan perintis jalan dan penyeberangan sebagai penghubung pusat kegiatan dan wilayah DTPK, termasuk dukungan subsidi angkutan; – Pengembangan layanan angkutan pemadu moda (first mile–last mile) yang terintegrasi dengan pelabuhan dan bandar udara; – Penyediaan dan peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dan simpul transportasi (keselamatan, informasi, dan penunjuk arah).	– Peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) angkutan jalan dan penyeberangan; – Peningkatan kualitas sarana dan prasarana terminal serta fasilitas pelayanan pengguna; – Penguatan pengawasan operasional dan kepatuhan teknis angkutan umum dan angkutan barang; – Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM penyelenggara transportasi darat.

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI PRIORITAS/PROJECT	KEGIATAN
			– Pembangunan dan/atau rehabilitasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK); – Subsidi operasional angkutan bus (terutama ke kawasan DTPK); – Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK); – Subsidi keperintisan angkutan barang jalan pendukung tol laut.	
		Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis	– Optimalisasi MRLL untuk debottlenecking jaringan jalan; – Pengendalian ODOL pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting; – Optimalisasi/pembangunan/rehabilitasi terminal penumpang, terminal barang, dan pelabuhan TSDP pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.	
	Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan sistem transportasi darat pada jalur utama logistik nasional	– Pengembangan terminal barang dan pelabuhan SDP pada jalur logistik utama; – Pelaksanaan subsidi Ro-Ro Long Distance Ferry.	
		Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	– Pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi pada simpul utama transportasi; – Penguatan jaringan layanan moda bus dan SDP eksisting terhadap simpul utama transportasi (termasuk pelaksanaan Subsidi Angkutan Multimoda dan Antarmoda); – Pengembangan dukungan untuk pengembangan kawasan ekonomi di sekitar simpul transportasi (pendukung aerotropolis, port estate industry area).	
Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan perhubungan darat	– Pengembangan sistem database penyelenggaraan angkutan umum; – Pengembangan sistem database MRLL jalan;	

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	SRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI PRIORITAS/PROJECT	KEGIATAN
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	– Penguatan sistem informasi manajemen transportasi darat (termasuk SIMLALIN); – Penerapan sistem pelaksanaan JTO (Jembatan Timbang Online); – Penerapan e-tilang; – Penguatan pelaksanaan E-SRUT dan E-BLUe	
			– Pengembangan SMART terminal dan pelabuhan; – Pengembangan ATCS di sejumlah koridor jaringan jalan nasional dan perkotaan; – Kajian dan penerapan ITS; – Pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis on-line (integrasi jadwal, ticketing, dan pembayaran); – Pengaturan sarana transportasi darat berteknologi baru (mobil listrik dan lain sebagainya).	
	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penguatan kelembagaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	– Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; – Peningkatan efektivitas koordinasi antar stakeholders dan prosedur pengambilan keputusan.	
		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	– Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; – Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (real-time); – Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.	
Meningkatnya pangsa angkutan umum massal	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan layanan angkutan missal perkotaan berbasis jalan	– Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan di kota-kota besar dan metropolitan (termasuk ibukota baru) melalui pembangunan integrated land transport system (ILTS);	

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	SRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI PRIORITAS/PROJECT	KEGIATAN
perkotaan berbasis jalan			–	Penyelenggaraan subsidi angkutan massal perkotaan (melalui skema buy the service);
			–	Penguatan integrasi sistem transportasi dan tata ruang perkotaan;
			–	Pengembangan ITS pada kawasan perkotaan;
			–	Pembangunan fasilitas integrasi antarmoda di kawasan perkotaan.
		Perencanaan dan pengembangan transportasi darat untuk Ibu Kota Negara (IKN)	–	Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan di kawasan IKN;
			–	Optimalisasi, pembangunan, rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke ibukota baru (selama proses konstruksi maupun operasional IKN);
			–	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana keselamatan transportasi jalan dan TSDP pendukung IKN;
			–	Penataan jaringan pelayanan transportasi darat pendukung IKN;
			–	Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi perkotaan IKN.
		Penguatan sistem penyelenggaraan transportasi perkotaan	–	Pembinaan dan pendampingan perencanaan angkutan perkotaan (termasuk Technical Assistance melalui Program SUTRINAMA-INDOBUS (hibah);
			–	Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi;
			–	Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan.

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	SRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI PRIORITAS/PROJECT	KEGIATAN
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan sistem pengawasan keselamatan LLAJ	–	Pelaksanaan MRLL pada jaringan jalan nasional;
			–	Implementasi Batas Kecepatan Jalan Nasional; Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
			–	Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB;
			–	Pengawasan ODOL di luar UPPKB;
			–	Penguatan/penertiban uji tipe dan akreditasi uji berkala (termasuk Pengembangan Fasilitas Pengujian Proving Ground BPLJSKB);
			–	Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (ramp check/inspeksi).
		Penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ	–	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;
			–	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan;
			–	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), perlintasan sebidang dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS, RASS);
			–	Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
	Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem pengawasan keselamatan SDP	–	Peningkatan kelaikan kapal SDP;
			–	Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP;
			–	Peningkatan pengawasan operasional SDP (ramp check).
		Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP	–	Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional;
			–	Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau;
			–	Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan (termasuk Pembangunan

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	SRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI PRIORITAS/PROJECT	KEGIATAN
				Alat Penimbangan/Jembatan Timbang pada Lintas Penyeberangan Utama); – Pembangunan VTS (Manajemen Lalu Lintas SDP).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja Kegiatan dalam Program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama periode 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

SASARA N KINERJA			INDIKA TOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2029	PENA NGGUNG JAWAB
SP 1			Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat					
SK1.1.2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25	31	Seksi Sarana	
SK1.1.3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK1.1.3A	Jumlah layanan Subsidi angkutan jalan penumpang pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provinsi (KSPN)	Unit	-	4	Seksi Sarana	
		IKK1.1.3.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Barang	Trayek		1	Seksi Sarana	
SK1.1.4	Meningkatnya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas AKAP	IKK1.1.1.4	Jumlah Pembangunan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Unit	-	2	Seksi Prasarana	
SK1.1.6	Meningkatnya layanan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor untuk mendukung konektivitas angkutan barang	IKK1.1.1.4	Jumlah Pembangunan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor untuk mendukung konektivitas	Unit	-	1	Seksi Prasarana	
SK1.2	Meningkatnya Konektivitas transportasi angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	IKK1.2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK	Trayek	6	6	Seksi Sarana	
		IKK1.2.2	Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk mendukung konektivitas	Trayek	0,7	1	Seksi Prasarana	
SP 2			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Darat					
SK2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	8	18	Seksi Lalin	
		IKK2.1.10	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	Paket	-	9	Seksi Lalin	
SK2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	Lokasi	4	4	Seksi Prasarana	
		IKK2.2.4	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	Kegiatan	4	4	Seksi Lalin	
SP 3			Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan					
SK3.1	Meningkatkan keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang	Kegiatan	4	4	Seksi Sarana	
		IKK3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang	Kegiatan	4	4	Seksi Sarana	
SK3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	4	4	Seksi Sarana	
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB				Seksi Sarana	
		IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Alat Pendukung Uji Kalibrasi	Paket	-	1	Seksi Sarana	
SK3.3	Menurunkan Jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	Unit	4.010	64.426	Seksi Lalin	
		IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan	Lokasi	1	6	Seksi Lalin	

SASARAN KINERJA			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2029	PENANGGUNG JAWAB
SK3.4	Meningkatnya Kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 3.3.4	Jumlah Pengadaan ZOSS yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)	Lokasi	-	4	Seksi Sarana
		IKK 3.4.1	Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Kegiatan	-	4	Seksi Sarana
		IKK 3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ	Kegiatan	-	5	Seksi Sarana
		IKK 3.4.3	Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Anak Usia Dini Oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda	Orang	-	1	Seksi Sarana
		IKK 3.4.4	Jumlah Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung Pengajaran Keselamatan Lalu Lintas	Lokasi	-	1	Seksi Prasarana
SP 4 Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan							
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	6	6	Subbag TU
		IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	4	4	Subbag TU
		IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	12	12	Subbag TU
		IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	2	2	Subbag TU
		IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Tindak Lanjut	100%	100%	Subbag TU
		IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Tindak Lanjut	-	100%	Subbag TU
		IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Tindak Lanjut	-	100%	Subbag TU
		IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	-	6	Subbag TU
		IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	Subbag TU

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kinerjanya) dari program penyelenggaraan transportasi darat pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada setiap tahun anggaran antara Tahun 2025-2029. Bahkan melalui e-performance, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat untuk jajaran di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

4.1.2 Target Keluaran (*Output*) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel 4.2** disampaikan target keluaran (output) dari pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat. Secara umum target keluaran yang diinginkan dari masing-masing kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan program penyelenggaraan transportasi darat selama periode 2025-2029.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

KODE		URAIAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
Prog	022.GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
Keg	4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat						
KRO	4637.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat						
RO	4637.CBP.016	Terminal Penumpang Tipe-A						
		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-A Kabupaten Sorong	Lokasi					1
		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-A Kabupaten Manokwari	Lokasi					1
RO	4637.CBP.	Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor						
		Pembangunan Layanan Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Lokasi				1	
RO	4637.CBP.022	PELABUHAN PENYEBERANGAN (PRIORITAS NASIONAL)						
		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana Tahap IV	Lokasi		1			
KRO	4637.QAH	Pelayanan Publik Lainnya						
RO	4637.QAH.001	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)						
	A	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Trayek	23	23	23	31	31
	B	Layanan Angkutan KSPN Raja Ampat	Trayek			4	4	4
RO	4637.QAH.008	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)						
		Penyelenggaraan Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	Trayek	21	22	22	22	23
Keg	4638	Pelayanan Transportasi Darat						
KRO	4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat						
RO	4638.CBP.033	Rehabilitasi /Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan						
	A	Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Arar	Lokasi		1			
	B	Pengadaan Lahan (Pembebasan Lahan Jalan Utama Pelabuhan Penyeberangan Klademak)	Lokasi			1		
	D	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Lokasi			1	1	
KRO	4638.CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat						
RO	4638.CDP.045	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola						
	A	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Arar (Pemda)	Lokasi	1	1	1	1	1
	B	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Batanta (Hubdat)	Lokasi	1	1	1	1	1
	C	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Salawati (Hubdat)	Lokasi	1	1	1	1	1
	D	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Klademak (Hubdat)	Lokasi	1	1	1	1	1
Keg	4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat						
KRO	4639.CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat						
RO	4639.CCC.055	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)						
	051	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Jalan nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya	Lokasi			2		2
RO	4639.CCC.212	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)						
		Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Provinsi	2	2	2	2	2
KRO	4639.PEH	Promosi						
RO	4639.PEH.049	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)						
	A	Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Papua Barat	Paket		1	1	1	1
	B	Pelajar Pelpor	Paket				1	1
RO	4639.PEH.054	Pengadaan Alat Kalibrasi						
		Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Paket			1		1
RO	4639.PEH.213	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)						
		Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)		1	1	1	1	1

KODE	URAIAN	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO	4639.PEH.215	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					
	A	Pemeliharaan dan Pengkalibrasian Unit Pemeriksaan Uji Non Statis	Paket	1	1	1	1
	B	Pemeliharaan Jembatan Timbang Portable	Paket	1	1	1	1
	D	Pemeliharaan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi	Paket	1	1	1	1
KRO	4639.RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat					
RO	4639.RAC.053	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)					
	A	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Provinsi	2	2	2	2
		- Ruas 001. 12 Jl. A. Yani					
		- Ruas 001. 13 Jl. Basuki Rahmat (Sorong)					
		- Ruas 002 Bts Kota Sorong - Almas (KM.18) - Klamono					
		- RUAS 003 KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN					
		- Ruas 007. 4 Sisu - Snoopy					
		- Ruas 008. 1 Snoopy - Kebar - Arfu					
		- Ruas 008. 2 Arfu - Prafi					
		- Ruas 012 Oransbari - Ransiki					
		- Ruas 013 Ransiki - Mameh					
		- Ruas 014 Mameh - Bintuni					
		- Ruas Jalan 002 Bts Kota Sorong - Almas (KM.18) - Klamono					
		- Ruas Jalan Fak Fak - Bandara Siboru (KSPN)					
	B	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Provinsi	2	2	2	2
		- Papua Barat (Kab. Manokwari)					
		- Provinsi Papua Barat Daya (Kab. Sorong Selatan)					
	C	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)	Provinsi	2	2	2	2
		- Ruas 010 Maruni - BTS. Kota Manokwari					
		- Ruas 003 Klamono - BTS Kab. Sorong Selatan					
Keg	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat					
KRO	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana					
RO	4640.ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana					
		- Penyusunan FS Terminal Tipe A Sorong	Dokumen		1		
		- Penyusunan FS Terminal Tipe A Manokwari	Dokumen		1		
		- Penyusunan FS Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Dokumen		1		
		- Penyusunan Dokumen DED Terminal Tipe A Sorong	Dokumen		1		
		- Penyusunan Dokumen DED Terminal Tipe A Manokwari	Dokumen		1		
		- Penyusunan Dokumen DED Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Dokumen		1		
		- Penyusunan Dokumen ANDALALIN Terminal Tipe A Sorong	Dokumen		1		
		- Penyusunan Dokumen ANDALALIN Terminal Tipe A Manokwari	Dokumen		1		
		- Penyusunan Dokumen ANDALALIN Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Dokumen		1		
KRO	4640.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
RO	4640.EBB.221	Pembangunan Gedung Kantor					
		Pembangunan Gedung Kantor BPTD Kelas II Papua Barat	Lokasi		1		
KRO	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					
RO	4640.FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					
	A	Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja	Kegiatan	1	3	3	3
	B	Pengelolaan urusan keuangan dan PNPB serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi	Kegiatan	1	3	3	3
	C	Pengelolaan Bidang Hukum Humas dan Umum	Kegiatan	1	2	2	2
	D	Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan	Kegiatan	1	2	2	2
	E	Monitoring pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi prasarana transportasi jalan dan SDP;	Lokasi		1	1	4
	F	Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi jalan dan SDP	Kegiatan	1	1	1	1
	G	Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala	Kegiatan	3	3	3	3

KODE		URAIAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	H	Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor	Kegiatan	1	1	1	1	1
	I	Pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal	Kegiatan	5	5	5	5	5
	J	Monitoring trayek AKAP dan layanan angkutan jalan dan sungai, danau, dan penyeberangan perintis	Kegiatan	1	1	1	1	1
	K	Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan	Kegiatan	2	2	2	2	2
	L	Monitoring dan Pemantauan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Kegiatan	2	2	3	3	3
	M	Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol	Provinsi	1	1	1	1	1
	N	Monitoring tarif angkutan jalan dan SDP	Provinsi	2	2	2	2	2
	O	Persetujuan teknis andalalin	Kegiatan	1	1	1	1	1
	P	Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai Danau Penyeberangan	Kegiatan	1	1	1	1	1
	Q	Pengawasan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai Danau Penyeberangan	Kegiatan	2	2	2	2	2
	R	Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan	Kegiatan	1	1	1	1	1
Prog	022.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Keg	4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat						
KRO	4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
RO	4596.EBB.906	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi						
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Kegiatan	1	1	1	1	1
RO	4596.EBB.907	Pengadaan Belanja Modal Lainnya						
		Pengadaan Mobil Crane	Unit			1		
		Pengadaan Bus	Unit			1		
Keg	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat						
KRO	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
RO	4670.EBA.994	Layanan Perkantoran						
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kegiatan	1	1	1	1	1
RO	4670.EBB.906	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Kegiatan	1	1	1	1	1

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

4.2.1 Kebutuhan pendanaan

Dokumen perencanaan anggaran jangka menengah BPTD Kelas II Papua Barat tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa total kebutuhan pagu sebesar Rp733.287.060.628 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Proporsi pagu anggaran jangka menengah BPTD Kelas II Papua Barat untuk periode tahun 2025 - 2029, yang dibagi ke dalam tiga kategori utama: Konektivitas, Pelayanan dan keselamatan. Alokasi anggaran ini mencerminkan strategi pembangunan transportasi darat yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas, keselamatan serta kualitas layanan publik.

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk periode pembangunan 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp Miliar) 2025-2029
Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat	733,28
Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	437,10
Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	13,73
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	181,96
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat	100,49

4.2.2 Skema Pendanaan

Skema pendanaan untuk memenuhi dalam Rencana Strategis (Renstra) BPTD Kelas II Papua Barat untuk periode tahun 2025–2029 berasal dari Rupiah Murni (RM). Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai tulang punggung pembiayaan.

Secara keseluruhan, skema pendanaan tersebut mencerminkan arah kebijakan pembiayaan yang masih didominasi oleh dana pemerintah pusat, dengan potensi untuk meningkatkan porsi pembiayaan alternatif guna memperkuat pembangunan infrastruktur transportasi darat secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era-era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis jalan tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang jalan (a/ SDP), yang membutuhkan peran seluruh stakeholder dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan jalan dapat terdelivery dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

Dengan disusunnya Renstra ini, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan transportasi darat nasional serta berkontribusi nyata terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.

Untuk implementasi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat 2025-2029 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025- 2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2025-2029 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2027) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LAMPIRAN

Lampiran I. Matrik Kerangka Pendanaan

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pelayanan Publik Lainnya	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Trayek		23	23	31	31	31	7.800.000	7.800.000	8.900.000	10.800.000	12.600.000
	1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Seget	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	397.392	397.392	394.000	394.000	394.000
	2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Klasari	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	313.100	313.100	310.000	310.000	310.000
	3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Arar	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	226.100	226.100	223.000	223.000	223.000
	4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Batu Payung - Klawak	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	397.500	397.500	394.000	394.000	394.000
	5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Saoka	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	214.700	214.700	212.000	212.000	212.000
	6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Inam - Kebar - Mia	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	304.000	304.000	301.000	301.000	301.000
	7. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Klafdalim	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	301.100	301.100	298.000	298.000	298.000
	8. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan Seremuk	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	241.200	241.200	238.000	238.000	238.000
	9. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Aitinyo	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	416.700	416.700	413.000	413.000	413.000
	10. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan Sasnek	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	278.800	278.800	275.000	275.000	275.000
	11. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Moswaren	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	258.300	258.300	255.000	255.000	255.000
	12. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Wayer	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	225.100	225.100	222.000	222.000	222.000
	13. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Ayamaru	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	344.400	344.400	341.000	341.000	341.000
	14. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kajase - Konda	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	201.200	201.200	198.000	198.000	198.000
	15. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kajase - Pasir Putih	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	311.600	311.600	308.000	308.000	308.000
	16. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kajase Haeramaran - Joksiro	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	298.500	298.500	295.000	295.000	295.000
	17. Layanan Subsidi Perintis Trayek Kajase - Waihal	Trayek	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	276.600	276.600	273.000	273.000	273.000
	18. Layanan Subsidi Perintis Trayek Manokwari - Masni	Trayek	Prov. Papua Barat	1	1	1	1	1	383.100	383.100	376.000	376.000	376.000
	19. Layanan Subsidi Perintis Trayek Manokwari - Sidey	Trayek	Prov. Papua Barat	1	1	1	1	1	446.900	446.900	440.000	440.000	440.000
	20. Layanan Subsidi Perintis Trayek Manokwari - Saray	Trayek	Prov. Papua Barat	1	1	1	1	1	496.400	496.400	489.000	489.000	489.000
	21. Layanan Subsidi Perintis Trayek Manokwari - Arfu	Trayek	Prov. Papua Barat	1	1	1	1	1	643.100	643.100	636.000	636.000	636.000
	22. Layanan Subsidi Perintis Trayek Manokwari - Mowiwaren	Trayek	Prov. Papua Barat	1	1	1	1	1	520.500	520.500	513.000	513.000	513.000
	23. Layanan Subsidi Perintis Trayek Mowiwaren - Ransiki	Trayek	Prov. Papua Barat	1	1	1	1	1	246.700	246.700	240.000	240.000	240.000
	24. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Arus	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			339.000	339.000	339.000
	25. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Konja	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			482.000	482.000	482.000
	26. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Kofalit	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			338.000	338.000	338.000
	27. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Suwiam	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			326.000	326.000	326.000
	28. Layanan Subsidi Perintis Trayek Teminabuan - Sawiat	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			250.000	250.000	250.000
	29. Layanan Subsidi Perintis Trayek Wasior - Aesandami	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			241.000	241.000	241.000
	30. Layanan Subsidi Perintis Trayek Wasior - Naikere	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			295.000	295.000	295.000
	31. Layanan Subsidi Perintis Trayek Wasior - Yopanggar	Trayek	Prov. Papua Barat			1	1	1			255.000	255.000	255.000
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Subsidi transportasi Angkutan Barang	Trayek				1	1	1			6.152.509	6.152.509	6.152.509
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Pembangunan Terminal Tipe A Sorong	Unit	Prov. Papua Barat Daya					1					60.000.000
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Pembangunan Terminal Tipe A Manokwari	Unit	Prov. Papua Barat					1					60.000.000
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Kaimana	Unit	Prov. Papua Barat	1					17.000.000				

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	21,00	22,00	22,00	22,00	23,00					
	1. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Kalobo	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	2. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Serpele	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	3. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Dulbatan	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	4. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Waisai	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	5. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Gag	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	6. Layanan Subsidi Perintis Trayek Gag - Gebe	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	7. Layanan Subsidi Perintis Trayek Gebe - Patani	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	8. Layanan Subsidi Perintis Trayek Patani - Weda	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	9. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Fakfak	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	10. Layanan Subsidi Perintis Trayek Fakfak - Wahai	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	11. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Babo	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	12. Layanan Subsidi Perintis Trayek Babo - Bintuni	Lintasan	Prov. Papua Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	35.371.000	35.371.000	37.241.000	38.576.000	40.586.000
	13. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Folley	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	14. Layanan Subsidi Perintis Trayek Folley - Waigama	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	15. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Arefi	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	16. Layanan Subsidi Perintis Trayek Arefi - Pam	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	17. Layanan Subsidi Perintis Trayek Sorong - Wejim	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	18. Layanan Subsidi Perintis Trayek Wejim - Kofiau	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	19. Layanan Subsidi Perintis Trayek Biak - Manokwari	Lintasan	Prov. Papua Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	20. Layanan Subsidi Perintis Trayek Biak - Numfor	Lintasan	Prov. Papua Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	21. Layanan Subsidi Perintis Trayek Manokwari - Numfor	Lintasan	Prov. Papua Barat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	22. Layanan Subsidi Perintis Trayek Usulan Sorong - Teminabuan	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	-	-	1,00	1,00	1,00					
	23. Layanan Subsidi Perintis Trayek Usulan Sorong - Kabare	Lintasan	Prov. Papua Barat Daya	-	-	1,00	1,00	1,00					
	Kegiatan Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaiklautan Kapal			1,00	1,00	1,00	1,00	-	98.065	100.765	102.897	104.857	
Pengoperasian dan Pengelolaan Layanan Fasilitas Penimbangan KB di	Pembangunan Fasilitas Penimbangan Klamono	Unit		-	-	-	1	-	-	-	-	20.000.000	-
Monitoring dan Evaluasi Tusi LLAJ (Non Keselamatan dan Dukman)	Monitoring dan Evaluasi Tusi LLAJ (Non Keselamatan dan Dukman)												
	1. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	2	3	3	3	3		226.825	300.000	300.000	300.000
	2. Pengelolaan urusan keuangan dan PNBPN serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	0	4	4	4	4		271.972	300.000	300.000	300.000
	3. Pengelolaan Bidang Hukum Humas dan Umum	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		2	2	2	2		295.985	300.000	300.000	300.000
	4. Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		2	2	2	2		500.960	500.000	500.000	500.000
	5A. Monitoring pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi prasarana transportasi jalan di Terminal Tipe A Sorong	Kegiatan	Kab. Sorong					1					150.000
	5B. Monitoring pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi prasarana transportasi jalan di Terminal Tipe A Manokwari	Kegiatan	Kab. Manokwari					1					250.000
	5C. Monitoring pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi prasarana transportasi jalan di Penimbangan KB Klamono	Kegiatan	Kab. Sorong					1					150.000
	6A. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi jalan di Terminal Tipe A Sorong	Kegiatan	Kab. Sorong										
	6B. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi jalan di Terminal Tipe A Manokwari	Kegiatan	Kab. Manokwari										
	6C. Monitoring operasional dan pelayanan prasarana transportasi jalan di di Penimbangan KB Klamono	Kegiatan	Kab. Sorong							648.000			
	7. Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		3	3	3	3		125.063	150.000	175.000	200.000
	8. Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor (MASUK KE IKK 3.2.1)	Kegiatan											
	10. Monitoring trayek AKAP dan layanan angkutan jalan	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		4	4	4	4		251.660	250.000	270.000	280.000

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
	11. Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan sistem informasi manajemen lalu lintas	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		71.268	80.000	100.000	110.000
	12. Monitoring dan Pemantauan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	3	3	3	3	3		107.455	110.000	120.000	130.000
	13. Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		93.168	110.000	120.000	130.000
	14. Monitoring tarif angkutan jalan	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		88.992	110.000	120.000	130.000
	15. Persetujuan teknis andalalin	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		93.168	110.000	120.000	130.000
	16. Penegakkan hukum bidang LLAJ	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		115.068	110.000	120.000	130.000
	17. Pengawasan Bidang LLAJ	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		93.168	110.000	120.000	130.000
	18. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1		93.168	110.000	120.000	130.000
Penyusunan Dokumen Teknis	Kajian DED/ANDALALIN/Dokumen Lingkungan Kebutuhan												
	1. Penyusunan FS Terminal Tipe A Sorong	Paket	Kab. Sorong			1					1.777.000		
	2. Penyusunan FS Terminal Tipe A Manokwari	Paket	Kab. Manokwari			1					1.777.000		
	3. Penyusunan FS Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Paket	Kab. Sorong			1					1.777.000		
	4. Penyusunan Dokumen DED Terminal Tipe A Sorong	Paket	Kab. Sorong			1					1.777.000		
	5. Penyusunan Dokumen DED Terminal Tipe A Manokwari	Paket	Kab. Manokwari			1					1.777.000		
	6. Penyusunan Dokumen DED Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Paket	Kab. Sorong			1					1.777.000		
	7. Penyusunan Dokumen ANDALALIN Terminal Tipe A Sorong	Paket	Kab. Sorong			1					1.777.000		
	8. Penyusunan Dokumen ANDALALIN Terminal Tipe A Manokwari	Paket	Kab. Manokwari			1					1.777.000		
	9. Penyusunan Dokumen ANDALALIN Fasilitas Penimbangan KB Klamono	Paket	Kab. Sorong			1					1.777.000		
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Arar	Unit	Kab. Sorong	-	1	-	-	-	-	605.000	-	-	-
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Arar	Unit	Kab. Sorong	1	1	1	1	1					
	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Batanta	Unit	Kab. Raja Ampat	1	1	1	1	1	2.516.175	9.133.413	693.233	693.233	693.233
	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Salawati	Unit	Kab. Raja Ampat	1	1	1	1	1					
	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Unit	Kota Sorong	1	1	1	1	1					
Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Monitoring dan Evaluasi Tusi ASDP	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD		1	1	1	1	-	251.660	251.660	251.660	251.660
Pengawasan dan Pengendalian AKAP AJAP & Pariwisata	Kegiatan Pengendalian dan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	-	-	-	-	1					71.268
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Ramp Check AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	2	2	2	2	2		65.176	67.176	73.243	77.965
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat		Kegiatan		-	-	-	-	-					
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	-	1	1	1	1	-	221.000	221.000	221.000	221.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	2	2	2	2	132.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	2	2	2	2	132.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Pembangunan Fasilitas Penimbangan KB di Klamono	Lokasi	Kab. Sorong				1					16.000.000	
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Laporan	Prov. PB & Prov. PBD	-	1	1	1	1	-	65.757	90.000	100.000	100.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Tersusunnya laporan hasil kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	Laporan	Prov. PB & Prov. PBD	3	3	3	3	3	150.000	175.000	175.000	200.000	200.000

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Paket	Prov. Papua Barat Daya	-	1	1	1	1	-	100.000	175.000	200.000	220.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Paket	Prov. Papua Barat Daya	-	1	1	1	1		300.000	350.000	400.000	400.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Pengadaan Alat Uji dan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Paket	Prov. Papua Barat Daya	-	-	1	-	1	-	-	1.500.000	-	-
Monitoring dan Pengawasan Penerapan <i>Blue Full Cycle</i>		Kegiatan											
Sarana Bidang Konektivitas Darat	Peningkatan Kompetensi Pegawai di Bidang kendaraan Bermotor												
	1. Diklat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor					4	4	4			50.000	52.000	54.000
	2. Diklat Kompetensi Penguji Tipe Kendaraan Bermotor					2	2	2			26.000	28.000	30.000
	3. Diklat Karoseri Kendaraan Bermotor					2	2	2			26.000	28.000	30.000
	4. Diklat Rancang Bangun Kendaraan Bermotor					2	2	2			26.000	28.000	30.000
	5. Bimtek Pengembangan Aplikasi UPUBKB					2	2	2			26.000	28.000	30.000
	6. Sosialisasi Karoseri terhadap Dealer dan Bengkel Resmi	Unit	Prov. PB & Prov. PBD			6	6	6			76.000	78.000	80.000
Sarana Bidang Konektivitas Darat	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional (Nama Ruas Jalan menyusul)	Paket											
	a. LPJU	Unit	Prov. PB & Prov. PBD	25	450	60	140	90	1.532.175	27.579.150	3.677.220	8.580.180	5.515.830
	b. Marka Jalan	M'		0	0	0	0	0					
	c. Delinator	Unit	Prov. PB & Prov. PBD	48	82	67	136	100	100.032	170.888	139.628	283.424	208.400
	d. Guard rail	M'	Prov. PB & Prov. PBD	200	500	200	200	110	3.293.600	8.234.000	3.293.600	3.293.600	1.811.480
	e. Rambu Lalu Lintas	Unit	Prov. PB & Prov. PBD	120	400	285	315	135	484.200	1.614.000	1.149.975	1.271.025	544.725
	f. Paku Jalan Bulat	Unit	Prov. PB & Prov. PBD	3000	23000	5000	8000	5000	1.992.000	15.272.000	3.320.000	5.312.000	3.320.000
Sarana Bidang Konektivitas Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan di Ruas Jalan Kab/Kota/Provinsi (Bantuan Teknis)	Paket											
	a. LPJU	Unit	Prov. PB & Prov. PBD										
	b. Marka Jalan	M'	Prov. PB & Prov. PBD		4	6	10	12	-	245.148	367.722	612.870	735.444
	c. Delinator	Unit	Prov. PB & Prov. PBD	396	240	480	600	720	17.374	10.530	21.059	26.324	31.589
	d. Guard rail	M'	Prov. PB & Prov. PBD		0	30	50	60	-	-	62.520	104.200	125.040
	e. Rambu Lalu Lintas	Unit	Prov. PB & Prov. PBD		0	5	7	10	-	-	82.340	115.276	164.680
	f. Paku Jalan Bulat	Unit	Prov. PB & Prov. PBD		24	35	43	50	-	96.840	141.225	173.505	201.750
Sarana Bidang Konektivitas Darat	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) Ruas Jalan SNOPY - KEBAR - ARFU	Paket											
	a. LPJU	Unit	Prov. Papua Barat			5	12	20			306.435	735.444	1.225.740
	b. Marka Jalan	M'											
	c. Delinator	Unit	Prov. Papua Barat	229	330	200	370	100	477.236	687.720	416.800	771.080	208.400
	d. Guard rail	M'	Prov. Papua Barat	70	120	100	85	85	1.152.760	1.976.160	1.646.800	1.399.780	1.399.780
	e. Rambu Lalu Lintas	Unit	Prov. Papua Barat	200	308	122	57	90	807.000	1.242.780	492.270	229.995	363.150
	f. Paku Jalan Bulat	Unit	Prov. Papua Barat	1000	1800	2000	2150	1500	664.000	1.195.200	1.328.000	1.427.600	996.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Perlengkapan Jalan Dukungan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Lokasi	Prov. PB & Prov. PBD	-	-	2	-	2	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Promosi	Terlaksananya Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Papua Barat dan Papua Barat Daya	Lokasi	Prov. PB & Prov. PBD	0	1	1	1	1	0	300.000	500.000	650.000	900.000
Promosi	Sadar Lalu Lintas Anak Usia Dini (SALUD) di Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	110.000	110.000	200.000	0	250.000
Promosi	Pembangunan Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan	Lokasi	Prov. Papua Barat Daya					1					3.000.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)			3	3	3	3	3					
	1. Penyusunan RKAKL	Kegiatan	DKI Jakarta	1	1	1	1	1	250.000	250.000	300.000	320.000	350.000
	2. Perencanaan	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	250.000	250.000	300.000	320.000	350.000
	3. Kegiatan Reviu Renstra	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	250.000	250.000	300.000	320.000	350.000

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penunjang Teknis Transportasi Darat	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)												
	1. Undangan Laporan Kinerja Tahunan	Kegiatan	DKI Jakarta	1	1	1	1	1	150.000	150.000	200.000	220.000	250.000
	2. Monitoring dan Evaluasi Sakip	Kegiatan	DKI Jakarta	1	1	1	1	1	150.000	150.000	200.000	220.000	250.000
	3. Pendampingan Angleb dan Nataru	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	80.000	80.000	150.000	160.000	170.000
	4. Pendampingan Pimpinan Menteri Perhubungan RI	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD			1	1	1	80.000	80.000	150.000	160.000	170.000
	5. Pendampingan Kunjungan Komisi V DPR RI	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	80.000	80.000	150.000	160.000	170.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)												
	1. Penyusunan revisi anggaran	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD										
	2. FGD peningkatan nilai IKPA	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	100.000	100.000	150.000	170.000	200.000
	3. Konsultasi dan Koordinasi di KPPN	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	4. Konsultasi dengan Inspektorat	Kegiatan	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan												
	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	100.000	100.000	150.000	170.000	200.000
	2. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	100.000	100.000	150.000	170.000	200.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	Indeks Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat												
	1. Penataan Administrasi Penghapusan Aset	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD										
	2. Hibah Aset APBN	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	100.000	100.000	150.000	170.000	200.000
	3. Inventarisasi dan Verifikasi Peralatan dan Mesin	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	4. Pemanfaatan Aset BMN	Kegiatan	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	5. Inventarisasi Stok Opname Persediaan	Kegiatan	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	6. Penilaian Tarif Objek Sewa BMN di Satuan Pelayanan	Kegiatan	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	Penyusunan Laporan BMN Satker Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	170.000	200.000
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	170.000	200.000
	Pembinaan dan Evaluasi Pengelola Keuangan (PK)	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	170.000	200.000
Legislasi dan Litigasi Transportasi Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12					
Dukungan Manajemen	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa												
	1. Pembangunan Gedung Kantor	lokasi	Prov. Papua Barat Daya			1					6.500.000		
	2. Pengadaan Video Conference	unit	Prov. Papua Barat Daya				1					150.000	
	3. Pengadaan Set Ruang Kerja	set	Prov. Papua Barat Daya				1					75.000	
	4. Pengadaan Printer	unit	Prov. PB & Prov. PBD			3	3	3			24.000	24.000	24.000
	5. engadaan Scanner	unit	Prov. PB & Prov. PBD			3	3	3			21.000	21.000	21.000
	6. Pengadaan Komputer	unit	Prov. PB & Prov. PBD			5	5	5			75.000	75.000	75.000
	7. Pengadaan Lemari Arsip	unit	Prov. PB & Prov. PBD			5	3	2			25.000	15.000	10.000
	8. Pengadaan Filling Kabinet	unit	Prov. PB & Prov. PBD			5	3	2			30.000	18.000	12.000
	9. Pengadaan Rak Besi	unit	Prov. PB & Prov. PBD			5	3	2			20.000	12.000	8.000
	10. Pengadaan Meubelair Ruang Rapat	set	Prov. PB & Prov. PBD			1					120.000		
	11. Pengadaan Bus Karyawan	unit	Prov. PB & Prov. PBD			1					900.000		
	12. Pembangunan /Pembelian Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	unit	Prov. PB & Prov. PBD			1					850.000		
	13. Pembangunan/Pembelian Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	unit	Prov. PB & Prov. PBD			1					700.000		
	14. Pembangunan / Pembelian Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	unit	Prov. PB & Prov. PBD			3					1.800.000		

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
	15. Pembangunan /Pembelian Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	unit	Prov. PB & Prov. PBD			4					2.200.000		
	16. Pembangunan / Pembelian Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	unit	Prov. PB & Prov. PBD			10					4.500.000		
	17. Pengadaan AC 2 PK	unit	Prov. PB & Prov. PBD			10	2	1			180.000	36.000	18.000
	18. Pengadaan AC 1 PK	unit	Prov. PB & Prov. PBD			15	4	2			180.000	48.000	24.000
	19. Pengadaan LCD Proyektor	unit	Prov. PB & Prov. PBD			2					50.000		
	20. Pengadaan Meja Kerja	unit	Prov. PB & Prov. PBD			20	10	5			40.000	20.000	10.000
	21. Pengadaan Kursi Kerja	unit	Prov. PB & Prov. PBD			20	10	5			30.000	15.000	7.500
	22. Pengadaan Tablet	unit	Prov. PB & Prov. PBD			8	2	1			48.000	12.000	6.000
	23. Pengadaan Smart TV	unit	Prov. PB & Prov. PBD			4	2	1			60.000	30.000	15.000
	24. Pengadaan Kulkas	unit	Prov. PB & Prov. PBD			4	2	1			24.000	12.000	6.000
	25. Pengadaan Dispenser	unit	Prov. PB & Prov. PBD			4	2	1			12.000	6.000	3.000
	26. Pengadaan Mesin Potong Rumput	unit	Prov. PB & Prov. PBD			4	2	1			20.000	10.000	5.000
	27. Pengadaan Sound System	set	Prov. PB & Prov. PBD			2	2	2			40.000	40.000	40.000
	28. Pengadaan Handy Talky	unit	Prov. PB & Prov. PBD			10					25.000		
	29. Pengadaan Tempat Tidur Susun	unit	Prov. PB & Prov. PBD			8					32.000		
	30. Pengadaan Scaffolding	unit	Prov. PB & Prov. PBD			10					60.000		
	31. Pengadaan Sofa Tamu	set	Prov. PB & Prov. PBD			5					35.000		
	32. Pengadaan Kendaraan Jabatan Roda 4	unit	Prov. PB & Prov. PBD					1					600.000
	33. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	unit	Prov. PB & Prov. PBD					1					400.000
	34. Pengadaan Kendaraan Roda 2	unit	Prov. PB & Prov. PBD					2					50.000
	35. Pengadaan Kendaraan Roda 3	unit	Prov. PB & Prov. PBD					1					50.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Pelatihan Jiwa Korsia	Kegiatan	Prov. Papua Barat Daya	1	1	1	1	1	675.000	790.000	1.080.000	1.140.000	1.290.000
Transportasi Darat	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	150.000	150.000
Dukungan Manajemen	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Asistensi Perda dan Raperda	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	150.000	150.000
Dukungan Manajemen	Sidang/Pertemuan dan Koordinasi Antar Instansi dalam rangka Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD										
Dukungan Manajemen	Sidang/Pertemuan dan Koordinasi Antar Instansi dalam rangka Kegiatan Kerjasama Luar Negeri	Kegiatan	Prov. PB & Prov. PBD										
Dukungan Manajemen	Pengklipingan Berita di Media Cetak Terkait Transportasi Darat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			50.000	50.000	50.000
Dukungan Manajemen	Pendokumentasian Acara/Kegiatan/Peristiwa di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Papua Barat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			50.000	50.000	50.000
Dukungan Manajemen	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			6.000.000	6.000.000	10.000.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Layanan Manajemen SDM	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12					
Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas, Disiplin dan Jiwa Korsia Pegawai di Lingkungan Ditjen Hubdat BPTD Kelas II Papua Barat	Kegiatan	Prov. Papua Barat Daya	1	1	2	2	2	675.000	790.000	1.080.000	1.140.000	1.290.000
Pengelolaan Organisasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12					
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Koordinasi Kelembagaan UPT Ditjen Hubdat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	150.000	150.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Sosialisasi Pembangunan ZI di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	150.000	150.000

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	LOKASI	TARGET					Anggaran dalam Ribu Rupiah				
				RO 2025	RO 2026	RO 2027	RO 2028	RO 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Sosialisasi Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			50.000	50.000	50.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan BPTD Kelas II Papua Barat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			300.000	300.000	300.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Pengembangan Data Perhubungan Darat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			300.000	300.000	300.000
	Langganan penyimpanan data Gdrive (Premium 2 TB)	Layanan/Tahun	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1	1.800	1.992	10.000	11.000	12.000
	Langganan aplikasi Microsoft 365	Layanan/Tahun	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1			10.995	11.295	12.495
	Langganan Aplikasi ClickUp	Layanan/Tahun	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1			85.000	87.000	90.000
	Langganan Aplikasi Canva Pro	Layanan/Tahun	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1			3.845	3.945	4.045
	Langganan Aplikasi Adobe Photoshop	Layanan/Tahun	Prov. PB & Prov. PBD	1	1	1	1	1			8.675	8.975	9.275
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Pengelolaan Website Ditjen Hubdat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12					
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi Standar Pelayanan serta kualitas pelayanan publik	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12					
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat	Koordinasi Laporan Pelaksanaan Tusi UPT Ditjen Hubdat	Layanan/Bulan	Prov. PB & Prov. PBD	12	12	12	12	12			150.000	150.000	150.000

Lampiran II. Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Pendukung DTPK



INDIKASI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Kawasan Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Kawasan Industri/ Hilirisasi



Lampiran III. Peta Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Pendukung



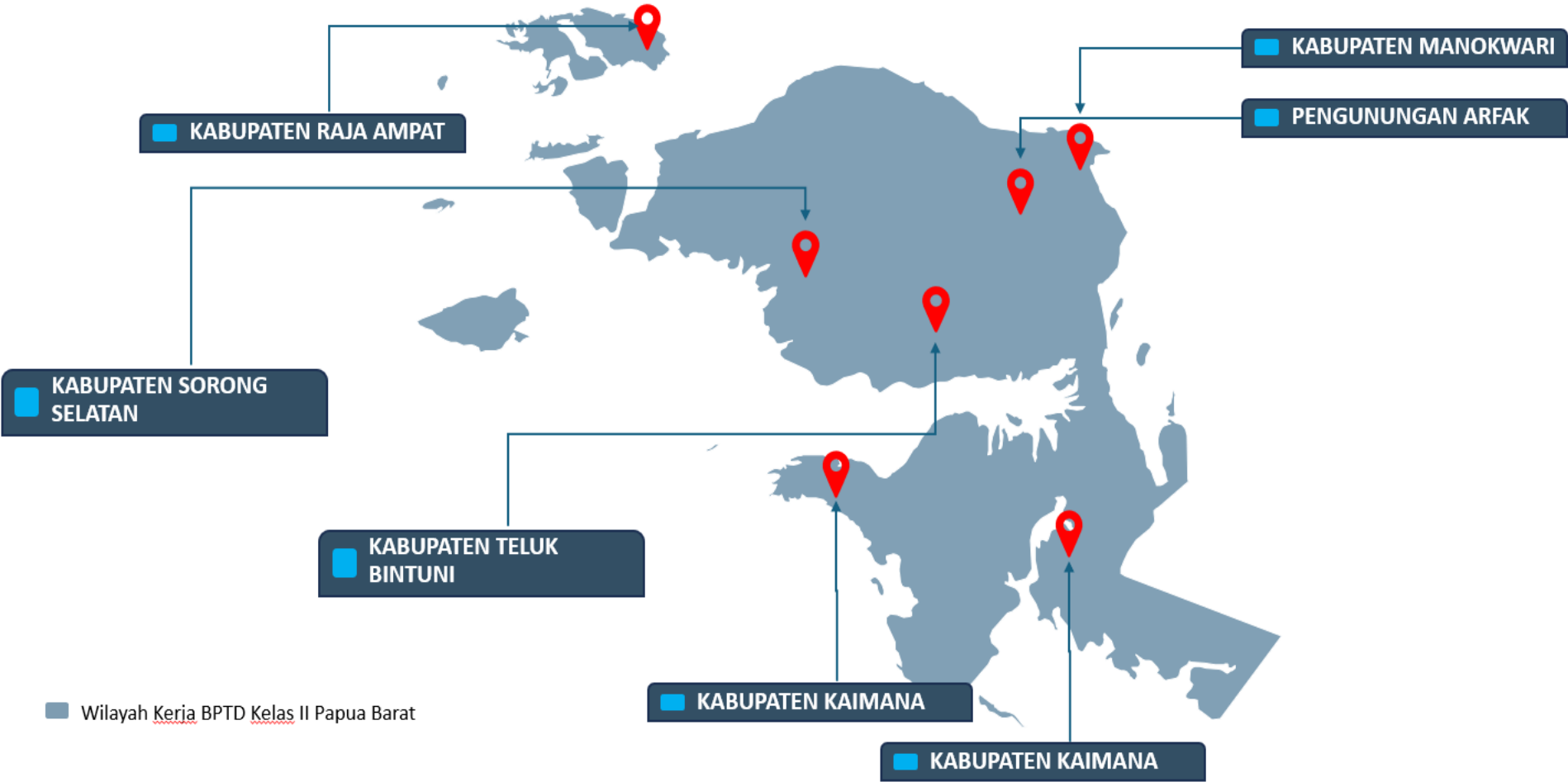
PEMBANGUNAN BARU TERMINAL TIPE A, UPPKB DAN REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN DIWILAYAH KERJA BPTD KELAS II PAPUA BARAT TAHUN 2025-2029



Lampiran IV. Peta Kawasan Pariwisata Prioritas



KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS



Lampiran V. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan



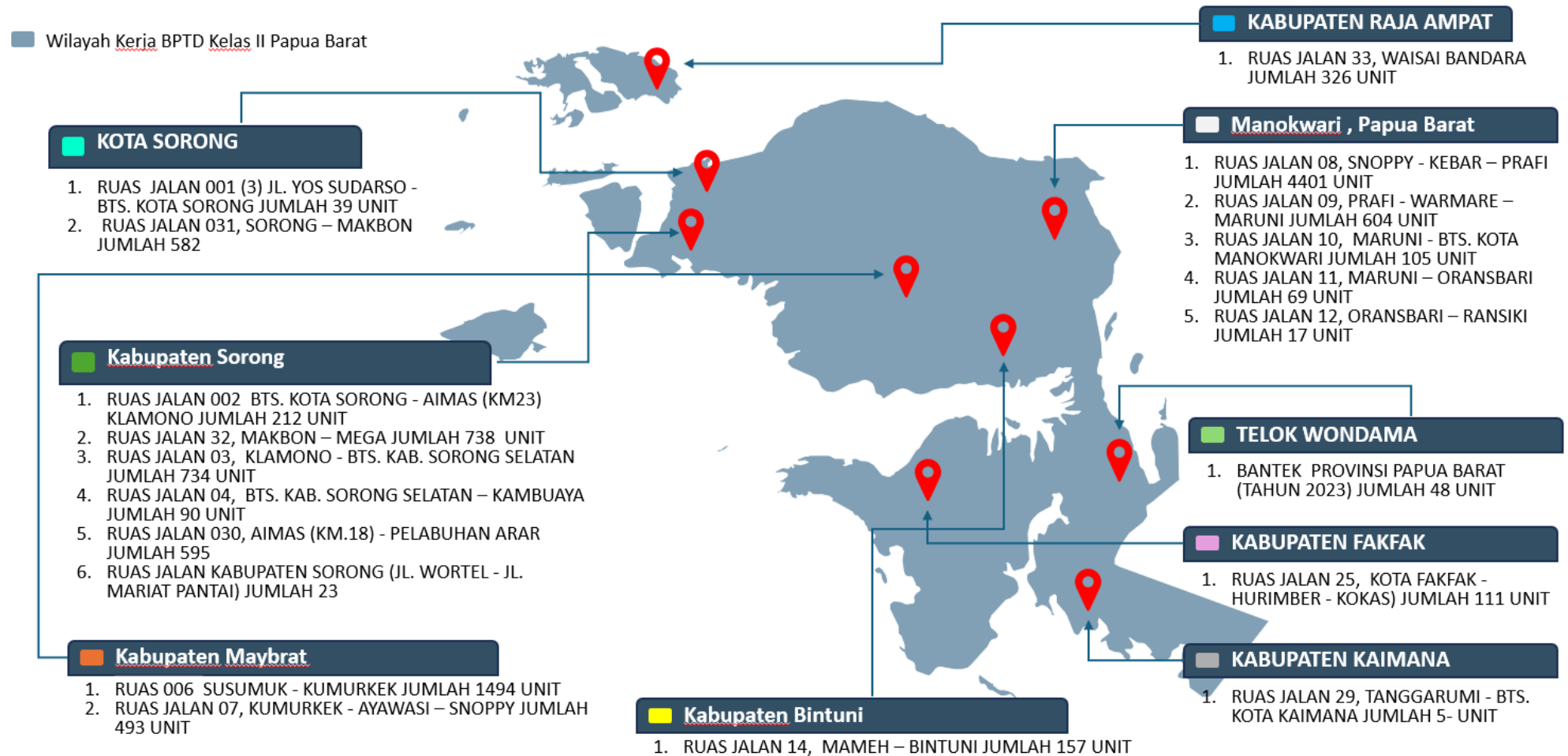
PERBAIKAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN



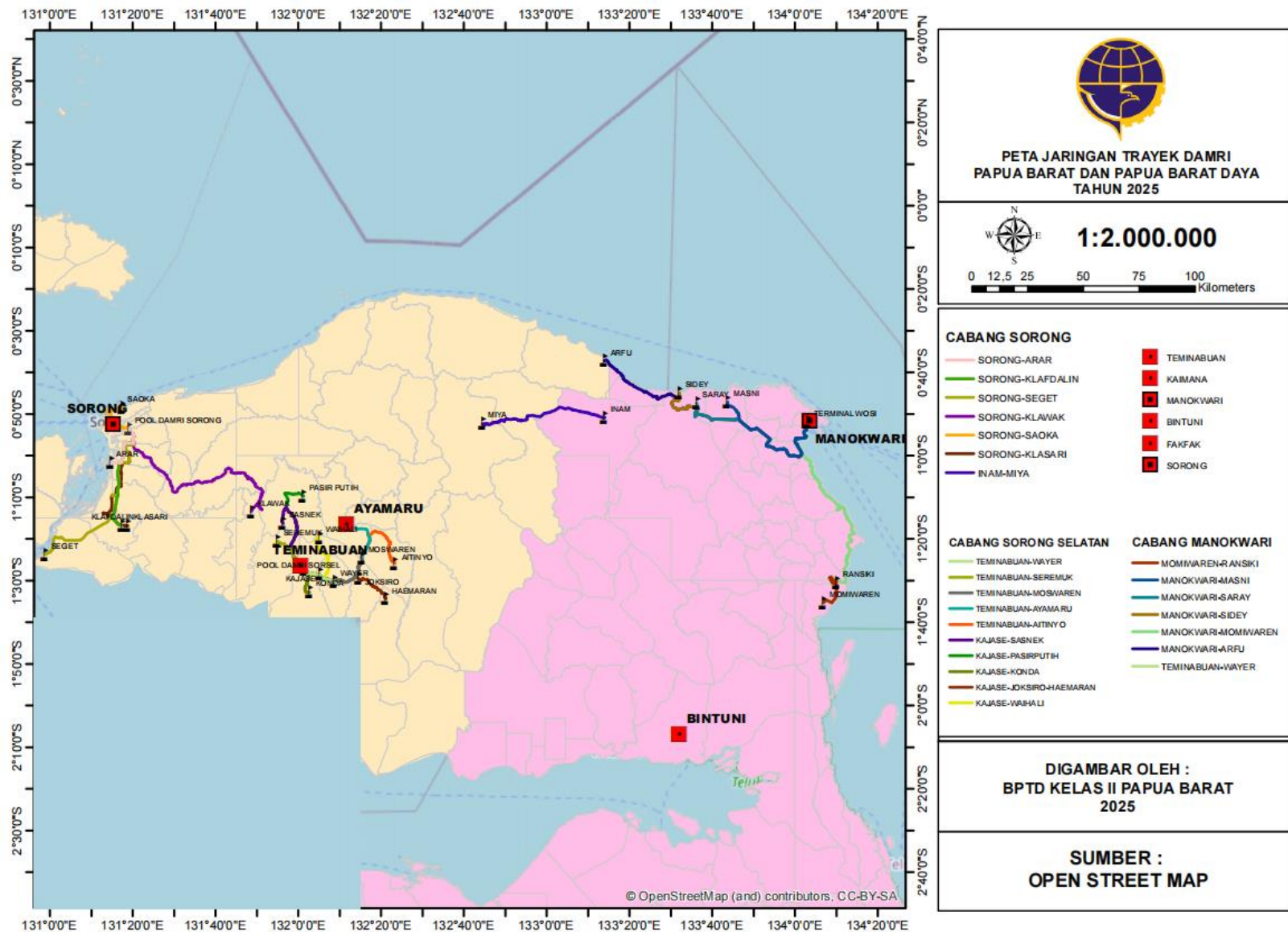
Lampiran VI. Indikasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung



INDIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG (PERLENGKAPAN JALAN 2020 – 2024)



Lampiran VII. Peta Subsidi Angkutan Jalan



Lampiran VIII. Peta Subsidi Angkutan Penyeberangan

